

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang berbudaya. Sebagai makhluk yang berbudaya, manusia perlu berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam berinteraksi diperlukan norma-norma dan etika agar hubungan manusia satu dengan lainnya harmonis, tidak terganggu, dan tidak ada masalah. Hampir setiap suku bangsa atau etnik memiliki aturan, norma, atau etika dalam pergaulan dan etika dalam berbahasa. Hal ini berlaku secara umum. Tak terkecuali, apakah mereka itu etnik Jawa, Sunda, Minangkabau, Cina, Sasak, atau lain-lain.

Manusia adalah hamba Allah yang termulia yang melebihi makhluk mana pun di dunia ini. Akan tetapi, perkembangan teknologi dan industri yang menghasilkan budaya teknokrasi yang berkembang pesat dan berpengaruh sangat luas menghanyutkan manusia yang kurang mantap kepribadiannya. Manusia yang termulia itu berubah menjadi hamba teknologi, menjadi konsumeris, dan harga dirinya disangkutkan pada dunia materi yang dengan satu perkataan oleh Prof. Dr. Sartono disebut sebagai dehumanisasi. Manusia menjadi hamba dan tergantung pada teknologi dan materi. Manusia hanya merupakan *onderdeel* dari dunia teknologi

(Suhardjo, 2005: 199). Kasus seperti ini oleh Lury (1998:14) disebutnya sebagai masyarakat yang berbudaya material. Dalam budaya material (Markhamah, 2000: 14) kebanyakan orang menggambarkan barang-barang miliknya menjadi citra dirinya. Featherstone (2001: 63) menyebutnya sebagai budaya konsumen. Dalam budaya konsumen pakaian dan benda-benda milik manusia sebagai simbol status kelas untuk mengklasifikasikan status pemakainya. Budaya konsumen kontemporer tampaknya memperluas konteks dan situasi yang menganggap bahwa tingkah laku semacam itu dianggap tepat dan dapat diterima.

Berkomunikasi dengan bahasa dan berkomunikasi dengan sesama orang Jawa tidak sekadar memahami dan bisa berbicara dalam bahasa Jawa, tetapi ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah kerukunan dan prinsip hormat. Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis (Suseno, 2001: 39). Prinsip hormat menyatakan bahwa setiap orang dalam cara berbicara dan membawa diri selalu harus menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Apabila dua orang Jawa berkomunikasi, bahasa, pembawaan, dan sikap mesti mengungkapkan suatu pengakuan terhadap kedudukan mereka masing-masing dalam suatu tatanan sosial yang tersusun dengan terperinci. Prinsip ini didasari pendapat bahwa semua hubungan dalam masyarakat teratur secara hierarkis. Keteraturan itu bernilai pada diri sendiri. Oleh karena itu, orang Jawa wajib mempertahankannya dan wajib membawa diri sesuai dengan nilai tersebut. Prinsip hormat ini dapat disejajarkan dengan prinsip sopan-santun dalam pengertian yang luas, baik dalam bahasa maupun dalam pergaulan sehari-hari. Sopan-santun berbahasa dalam bahasa Jawa menyangkut dua hal, yaitu tingkah laku atau sikap dalam berbahasa penutur dan wujud tuturannya (Suwadji, dalam Suharti, 2004: 62).

Berkomunikasi dengan bahasa tidak sekadar memahami dan dapat berbicara dalam bahasa yang digunakannya, tetapi ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah kerukunan dan prinsip hormat. Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis (Suseno, 2001: 39). Prinsip hormat menyatakan bahwa setiap orang dalam cara berbicara dan membawa diri selalu harus menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Apabila dua orang Jawa ber-komunikasi, bahasa, pembawaan, dan sikap mesti mengungkapkan suatu pengakuan terhadap kedudukan mereka masing-masing dalam suatu tatanan sosial yang tersusun dengan terperinci. Prinsip ini didasari pendapat bahwa semua hubungan dalam masyarakat teratur secara hierarkis. Keteraturan itu bernilai pada diri sendiri. Oleh karena itu, orang Jawa wajib mempertahankannya dan wajib membawa diri sesuai dengan nilai tersebut. Prinsip hormat ini dapat disejajarkan dengan prinsip sopan-santun dalam pengertian yang luas, baik dalam bahasa maupun dalam pergaulan sehari-hari. Sopan-santun berbahasa dalam bahasa Jawa menyangkut dua hal, yaitu tingkah laku atau sikap dalam berbahasa penutur dan wujud tuturannya (Suwadji, dalam Suharti, 2004: 62; Markhamah, 2006: 2).

Selain prinsip hormat dalam berbahasa, pemakai bahasa juga perlu mentaati kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada bahasa yang bersangkutan, baik secara sintaktis, morfologis, maupun secara fonologis. Secara sintaktis, setiap bahasa memiliki kaidah sintaktis tersendiri yang tidak dapat diabaikan oleh pemakai bahasa yang bersangkutan. Salah satu kaidah di antaranya adalah kaidah yang mengatur jenis kalimat tertentu, misalnya kalimat aktif dan kalimat pasif. Dalam kalimat aktif, misalnya bahasa Gorontalo terdapat kaidah urutan dasar AVP (Agen-Verba-Pasien) yang berkorelasi dengan preposisi dan nomina-adjektiva (AVP < prep, N-Adj). Secara semantis, agen pada umumnya diisi oleh argument (+hu-

man, +animat) dalam klausa-klausa aktif intransitif dan transitif (Usman, 2008).

Penelitian Usman tersebut menunjukkan salah satu kaidah bidang sintaksis khususnya berkaitan dengan klausa aktif. Dalam suatu bahasa, termasuk pada bahasa Indonesia, selain klausa/kalimat aktif, terdapat klausa/kalimat pasif. Perihal kalimat aktif dalam bahasa Indonesia sudah cukup banyak diungkap dalam berbagai tatabahasa. Hal-hal yang berkaitan dengan kalimat pasif yang sudah diungkap di antaranya terkait dengan perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif dan makna kalimat pasif (Moeliono, dkk., 1988). Satu hal yang menarik adalah pernyataan Samsuri (1985) yang menyatakan bahwa masalah papsif tidak ada dalam bahasa Indonesia. Yang ada menurutnya adalah konstruksi fokus, dan salah satu konstruksi fokus itu adalah fokus pada objek, ialah dengan penggunaan verba berawalan *di-*. Alasannya: (1) pemakaian bentukan verba berawalan *di-* bukan soal kepasifan, melainkan soal pemfokusan objek, (2) tidak semua subjek dapat dipasifkan, di antaranya subjek *aku* dan *engkau*, (3) tidak semua verba berawalan *meN-* dapat dipasifkan, (4) tidak semua verba berawalan *di-* berawal dari pemasifan, (5) dalam percakapan bentukan *di-* tidak dapat diganti oleh bentukan *meN-*. Pernyataan ini menarik karena di beberapa buku lain, misalnya pada buku *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (Moeliono, dkk., 1988), *Kalimat Efektif* (Soedjoto, 1988), dan *Predikat –Objek dalam Bahasa Indonesia: Keselarasan Pola Urutan* (Sudaryanto, 1979) dinyatakan adanya kalimat pasif. Walaupun pada buku sintaksis (misalnya Ramlan, 1987; Parera, 1985; Wojowasito, 1976) tidak dibahas kalimat pasif, pada buku tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit mengenai ketiadaannya. Artinya, pada buku itu tidak dinyatakan secara eksplisit bahwa kalimat pasif tidak ada.

Walaupun masalah kalimat aktif telah dibahas, masih banyak hal yang perlu diungkap, misalnya bagaimana masalah kepasifan

dalam klausa? Masalah yang dimaksud di antaranya: Bagaimana ciri-ciri morfologis verbanya, bagaimana perilaku sintaktisnya (samakah dengan kalimat pasif)?, dan bagaimana hubungan pelaku-tindakan dalam klausa pasif. Permasalahan inilah, khususnya pada klausa pasif yang terdapat pada teks terjemahan Al-Quran yang mengandung etika berbahasa. yang akan dikaji pada penelitian hibah kompetensi tahun III.

B. Permasalahan

Permasalahan tahun II: (1) bagaimanakah analisis fungsi dan strukturnya pada klausa terjemahan Al-Quran pada ayat-ayat yang mengandung etika berbahasa, (2) bagaimanakah analisis peran dan strukturnya? Bagaimanakah analisis kategori dan strukturnya pada klausa terjemahan Al-Quran pada ayat-ayat yang mengandung etika berbahasa, (4) bagaimanakah kaidah keselarasan, fungsi, kategori, dan peran pada klausa terjemahan Al-Quran pada ayat-ayat yang mengandung etika berbahasa.

Permasalahan tahun III : (1) bagaimanakah karakteristik morfologis bentuk pasif dalam teks terjemahan Al-Quran, (2) bagaimanakah perilaku sintaksisnya, dan (3) bagaimanakah hubungan pelaku-tindakan bentuk pasif pada teks terjemahan Al-Quran.

C. Tujuan

Tujuan tahun III adalah:

- a. Menganalisis karakteristik morfologis bentuk pasif dalam teks terjemahan Al-Quran,
- b. Menjelaskan perilaku sintaksis bentuk pasif dalam teks terjemahan Al- Quran, dan
- c. Menganalisis hubungan pelaku-tindakan bentuk pasif pada teks terjemahan Al-Quran.
- d. Menyusun artikel publikasi hasil penelitian keselarasan,

fungsi, kategori, dan peran klausa terjemahan Al-Quran yang mengandung etika berbahasa.

- e. Menyusun buku ajar berjudul Analisis Kesalahan dan Karakteristik Bentuk Pasif.

D. Road Map Kegiatan Penelitian

Penelitian ini merupakan lanjutan dari kegiatan-kegiatan penelitian yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Tahun 2003-2004 peneliti telah melakukan kajian terhadap aspek sosiolinguistik, khususnya partisipan tutur pada teks terjemahan Al-Quran yang mengandung etika berbahasa. Berikutnya dilakukan penelitian bidang sosiolinguistik lagi, khususnya analisis terhadap partisipan tutur yang terlibat di dalam teks terjemahan Al-Quran tersebut. Penelitian ini dilakukan tahun 2007-2008. Pada tahun 2008 analisis juga diperdalam pada kesantunan berbahasa setelah beberapa aspek sosiolinguistik dikaji. Pada tahun 2009-2010 dianalisis aspek linguistiknya. Penelitian dilanjutkan dengan keselarasan pola fungsi, kategori, dan peran (2009) dan karakteristik bentuk pasif pada pada teks terjemahan tersebut (tahun 2010).

E. Kegiatan yang Telah Dilakukan Tahun I dan II

Berbagai penelitian dan kajian terhadap aspek sosiolinguistik, khususnya kesantunan berbahasa dan linguistik telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut ini dipaparkan.

Berkomunikasi dengan bahasa dan berkomunikasi dengan sesama orang Jawa tidak sekadar memahami dan dapat berbicara dalam bahasa Jawa, tetapi ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah kerukunan dan prinsip hormat. Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis (Suseno, 2001: 39). Prinsip hormat menyatakan bahwa setiap orang dalam cara ber-

bicara dan membawa diri selalu harus menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Apabila dua orang Jawa berkomunikasi, bahasa, pembawaan, dan sikap mesti mengungkapkan suatu pengakuan terhadap kedudukan mereka masing-masing dalam suatu tatanan sosial yang tersusun dengan terperinci. Prinsip ini didasari pendapat bahwa semua hubungan dalam masyarakat teratur secara hierarkis. Keteraturan itu bernilai pada diri sendiri. Oleh karena itu, orang Jawa wajib mempertahankannya dan wajib membawa diri sesuai dengan nilai tersebut. Prinsip hormat ini dapat disejajarkan dengan prinsip sopan-santun dalam pengertian yang luas, baik dalam bahasa maupun dalam pergaulan sehari-hari. Sopan-santun berbahasa dalam bahasa Jawa menyangkut dua hal, yaitu tingkah laku atau sikap dalam ber-bahasa penutur dan wujud tuturannya (Suwadji, dalam Suharti, 2004: 62).

Ada dua sisi yang perlu mendapatkan perhatian ketika seseorang berkomunikasi. *Pertama*, bahasanya sendiri. *Kedua*, sikap atau perilaku ketika berkomunikasi. Terkait dengan bahasanya terdapat kaidah kebahasaan yang perlu ditaati. Termasuk di dalam kaidah kebahasaan ini adalah kaidah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik yang berlaku pada bahasa yang dipilihnya sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, seseorang yang berkomunikasi perlu memperhatikan etika berbahasa. Hal-hal yang berhubungan dengan etika berbahasa ini di antaranya kaidah-kaidah dan norma sosial yang berlaku pada masyarakat tempat seseorang berkomunikasi dengan orang lain, sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat itu, norma-norma keagamaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, dan sistem-sistem kultural lainnya yang berpengaruh dalam pemakaian bahasa seseorang dalam suatu masyarakat.

Sikap dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti: '(1) kokoh atau bentuk tubuh, (2) cara berdiri (tegak, teratur, atau dipersiapkan

untuk bertindak), (3) perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian (pendapat, keyakinan), (4) perilaku, gerak-gerik)' (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 938). Sikap dalam berbahasa di sini yang dimaksudkan adalah perilaku atau gerak-gerik ketika seseorang menggunakan bahasa atau berkomunikasi dengan orang lain.

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 270). Etika komunikasi dikesampingkan sehingga orang dirugikan oleh hadirnya komunikasi. Banyak orang yang menulis di internet lantaran terjadi pembunuhan karakter (*character assassination*) pada diri mereka yang pelakunya pihak yang masih sesaudara sebangsa.

Di samping itu, di lingkungan pers masih dikembangkan komunikasi yang tidak jernih (: jujur) – misalnya penulis berita di media massa tidak sabar menempuh kerja yang profesional dengan menggali sumber informasi yang kualitas.

Keterbukaan (transparansi) dalam pemberitaan, seperti kata Qodry Azizy (*Jawa Pos*, 14 Juni 2000) hampir tidak ada rambu-rambu, *unggah-ungguh*, etika dan bahkan hati nurani. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa keterbukaan sering menampakkan ujungnya bukan rahmat, namun “laknat”. Komunikasi yang produktif, harmonis, dan bermanfaat belum terwujud di kalangan elite. Antarelite saling membuka obral saling mencerca demi keterbukaan, saling kritik, saling melecehkan, dan saling menjegal – mereka tidak mempunyai kebersamaan dalam membahas masalah bangsa dan negara, saling mengingatkan dan menegur, lalu merangkum rumusan hasil berdebat/berbeda pendapat. Yang muncul adalah hasil saling menghujat (Sabardila, dkk., 2003).

Bahwa orang Indonesia tidak terbiasa menerapkan etika dalam setiap sendi kehidupan selaras dengan pernyataan Nurcholis Madjid, Cendikiawan Muslim.

Indonesia nyaris hancur karena masyarakatnya tidak terbiasa menerapkan etika dalam tiap sendi kehidupan. (Jawa Pos, 4 April 2002).

Etika berbahasa tidak menonjol dalam pengajaran Bahasa Indonesia. Yang ramai dipersoalkan adalah tentang penggunaan bahasa Indonesia yang benar, seperti dalam *Bahasa Indonesia yang Salah dan yang Benar* (Ramlan, dkk., 1992). Bahasa yang santun dan jernih tidak dipraktikkan dalam pergaulan. Yang muncul adalah bahasa untuk menyakiti, mengejek, mengancam, menimbulkan rasa bersalah, menyembunyikan, kebenaran atau keadaan sesungguhnya, menggeserkan tanggung jawab, menunjukkan ketidakpedulian, memancing perkelahian, mengecam, atau menyebar kebohongan. Bila demikian, orang Indonesia yang mayoritas beragama Islam amat perlu mendapatkan pola yang bersumberkan Al-Quran dan Hadits agar mampu menciptakan pergaulan dalam masyarakat yang pluralis (Sabardila, dkk., 2003).

Berdasarkan latar belakang itulah, peneliti tertarik untuk mengkaji kesantunan berbahasa dalam teks terjemahan Al-Quran yang mengandung etika berbahasa. Jika di dalam teks tersebut dinyatakan mengenai etika berbahasa, sejauh manakah kesantunan berbahasa di dalam teks itu sendiri. Piranti-piranti apakah yang digunakan untuk menyatakan kesantunan berbahasa dalam teks itu.

Santun berarti: (1) halus dan baik (budi bahasanya, tingkah lakunya) sabar dan tenang, sopan, (2) penuh rasa belas kasihan, suka menolong (Tim Penyusun KBBI, 2002: 997). Sopan adalah: (1) hormat dan takzim (akan, kepada) tertib menurut adat yang baik (2) beradab tentang tingkah laku, tutur kata, pakaian, dsb., (3) baik kelakuannya (tidak lacur, tidak cabul (Tim Penyusun KBBI, 2002: 1084).

Dalam Islam santun adalah bagian dari akhlak. Akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang dari keadaan itu lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui pemikir-

an, pertimbangan, atau penelitian. Jika keadaan itu melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji menurut pandangan akal dan syarak (hukum Islam) disebut akhlak yang baik. Sebaliknya, jika keadaan itu menimbulkan perbuatan yang tidak baik atau tidak terpuji dinamakan akhlak yang buruk atau tidak baik.

Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Oleh karena itu, setiap pelajaran agama akan berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang terpuji (mulia) yang disebut *akhlaqul karimah*. Akhlak ini adalah akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad saw. yang sering disebut akhlak Islam. Akhlak Islam adalah akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Quran merupakan firman Allah swt. akhlak Islam mempunyai ciri tertentu dan ciri itu berbeda dengan akhlak yang berasal dari manusia (akhlak *wad'yah*). Ciri yang dimaksud: (1) kebajikannya bersifat mutlak, yakni kebaikan yang murni, baik untuk individu maupun masyarakat dalam lingkungan, waktu, dan keadaan bagaimana pun, (2) kebajikannya bersifat menyeluruh, yang merupakan kebaikan untuk seluruh umat, segala zaman, dan semua tempat, (3) tetap, langgeng, dan mantap, (4) merupakan kewajiban yang harus dipatuhi, yang berarti merupakan suatu hukum yang harus dipatuhi dan jika tidak dipatuhi terdapat sanksi hukum bagi orang yang melanggarnya, (5) pengawasannya bersifat menyeluruh dan pengaruhnya kepada manusia sangat kuat (Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993: 102).

Wujud akhlak mulia dalam Islam antara lain: (1) berani dalam segala hal yang positif (untuk mengatakan dan membela kebenaran serta menghadapi tantangan dan ancaman), (2) adil dalam memutuskan sesuatu tanpa membedakan kedudukan, status sosial, ekonomi, atau hubungan kekerabatan, (3) bijaksana dalam menghadapi dan memutuskan sesuatu, (4) mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi, (5) pemurah dan suka menafkahkan hartanya, (6) iklas dalam melakukan perbuatan semata-mata karena

allas swt. semata, cepat bertobat dan minta ampun kepada Tuhan, (7) cepat bertobat dan minta ampun kepada Tuhan jika melakukan suatu dosa, (8) jujur dan benar, (9) tenang dalam menghadapi berbagai masalah, tidak berkeluh kesah, dan gundah-gulana, (10) amanah (dapat dipercaya), (11) sabar dalam menghadapi setiap cobaan, (12) pemaaf, (13) penuh kasih sayang dan belas kasihan, (14) lapang hati dan tidak balas dendam, (15) selalu optimis menghadapi kehidupan, (16) *iffah*, yakni selalu menjaga diri dari segala sesuatu yang merusakkan kehormatan dan kesucian, (17) *al-haya'*, yakni *malu melakukan perbuatan yang tidak baik*, (18) *tawadu'* (merendahkan diri), (19) mengutamakan perdamaian daripada permusuhan, (20) *zuhud* dan tidak rakus terhadap kehidupan duniawi, (21) rida atas segala ketentuan yang ditetapkan Allah, (22) setia terhadap teman, sahabat dan siapa saja yang terkait dengannya, (23) bersyukur atas segala nikmat yang diberikan atau musibah yang ditimpakan dan berterima kasih kepada sesama manusia, (24) mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, (25) bertawakal setelah segala usaha dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, (26) dinamis sampai tujuan dan cita-citanya tercapai, (27) murah senyum dan menampilkan wajah yang ceria kepada orang lain, (28) selalu memperhatikan keadaan tetangga dan lingkungan tempat tinggalnya, (29) menghormati dan menghargai orang lain secara tulus, (30) menjauhi sifat iri hati dan dengki, (31) rela berkorban demi kepentingan umat manusia dan dalam membela agama (Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993: 102-103).

Dalam kaitan dengan komunikasi, beberapa akhlak Islam ini dapat disejajarkan dengan norma tutur, khususnya norma interaksi yang dikemukakan oleh Hymes (1975) yang juga dikutip oleh Suwito (1992). Norma tutur adalah aturan-aturan bertutur yang mempengaruhi alternatif-alternatif pemilihan bentuk tutur. Dengan demikian, maka norma tutur bertalian dengan santun bertutur, dan santun itu harus tampak dalam pemilihan bentuk tutur yang diungkapkan

oleh penuturnya (Suwito, 1992: 141) .

Hymes (dalam Suwito, 1992: 141) membedakan norma tutur menjadi dua macam, yaitu (1) norma interaksi (*norms of interaction*), dan (2) norma interpretasi (*norms of interpretation*). Norma interaksi adalah norma yang bertalian dengan boleh tidaknya sesuatu dilakukan oleh masing-masing penutur ketika interaksi verbal berlangsung. Norma ini menyangkut hal-hal yang merupakan etika umum dalam bertutur sehingga sifatnya relatif objektif. Norma interpretasi merupakan norma yang didasarkan pada interpretasi sekelompok masyarakat tertentu terhadap suatu aturan, yang dilatarbelakangi nilai sosio-kultural yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Before taking a particular action, a speaker must determine seriousness of face-threatening act. They thus posit three independent and culturally-sensitive variables, with they claims subsume all others that play a principal role: (1) the social distance (D) of S and H (a symmetric relation), indicating the degree of familiarity and solidarity shared by the S and H, (2) the relative "power" of S and H (an asymmetric relation) indicating the degree to which the S can impose will on H, (3) the "absolute ranking (R) of impositions in particular culture" both in terms of the expenditure of goods and/or services by the H, the right of the S to perform the act and the degree to which the H welcomes the imposition (Brown and Levinson, dalam Aziz, 2003: 172).

Norma interaksi tampak apabila terjadi interaksi verbal langsung antarpemutur. Untuk dapat mencapai komunikasi seperti itu, kedua pihak harus selalu menjaga apa-apa yang sebaiknya dilakukan, dan apa-apa yang seyogyanya tidak dilakukan waktu mereka saling bertutur. Norma interaksi memberi batas-batas apakah sebaiknya dilakukan terhadap lawan tutur, dan apa pula yang sebaiknya tidak dilakukan terhadapnya. Norma ini berlaku secara umum dan untuk semua bahasa.

Berbicara terus-menerus tanpa memberi kesempatan kepada lawan tutur untuk ganti bertutur, atau sikap tak acuh dalam menanggapi pembicaraan lawan tutur, merupakan perbuatan kurang terpuji dan sebaiknya tidak dilakukan. Demikian pula kebiasaan memotong tuturan orang lain sebelum ia selesai bicara, termasuk pelanggaran norma tutur sehingga perlu dihindari. Tunjukkanlah sikap simpatik terhadap pembicaraan lawan tutur dan jangan memotong pembicaraannya sebelum ia selesai bicara.

Norma-norma interpretasi berkaitan dengan latar belakang sosial budaya yang hidup di dalam masyarakat yang bersangkutan. Norma-norma semacam itu bersifat unik karena didasarkan pada penafsiran (interpretasi) suatu masyarakat tertentu terhadap perilaku tutur tertentu dalam proses komunikasi (Suwito, 1992: 144) .

Penafsiran terhadap sikap dan gerak-gerik anggota badan yang menyertai tuturan seseorang. Di dalam masyarakat Jawa terdapat beberapa sikap dan perilaku yang dianggap baik dalam rangka komunikasi. Mengacungkan ibu jari dan sedikit membungkukkan badan untuk menyertai ungkapan verbalnya. Kepada orang yang dihormati sebaiknya tidak berbicara terlampau keras, tidak menatap langsung ke arah wajahnya secara tajam, bercakak pinggang, lebih-lebih di depan orang yang lebih tua atau yang dituakan.

Setiap penutur dituntut untuk berbicara dengan ucapan yang jelas, unsur kalimatnya lengkap dan susunannya runtut, serta pokok tuturan (*topic*)-nya menarik. Penutur yang dapat bertutur dengan cara dan syarat-syarat seperti itu dinilai sebagai seorang yang pandai berbicara dan simpatik. Penutur yang tuturannya tidak jelas dan sukar ditangkap akan dikatakan bahwa dia “hanya komat-kamit saja”. Penutur demikian dinilai sebagai penutur yang tidak pandai berbicara dan tuturannya.

Orang Arab berpendapat bahwa bertutur yang sebaik-baiknya ialah bertutur yang dilakukan dengan suara yang cukup keras, saling menatapkan pandangan terhadap lawan tutur, dan berusaha saling

mendekatkan diri (Suwiito, 1982:144).

Dengan adanya norma yang harus diterapkan dalam berkomunikasi itu sebenarnya menunjukkan bahwa bahasa itu tidak netral, bahwa bahasa berhubungan dengan hal-hal di luar bahasa. Bahasa sebenarnya bersifat netral. Bahasa menjadi baik atau tidak baik dalam penggunaannya oleh pihak tertentu. Dalam pandangan instrumentalis, pengguna adalah subjek-subjek yang merdeka dan bebas dapat memperlak dan menjungkirbalikkan bahasa, atau secara kreatif menyusun bahasa indah. Dalam komunikasi sosial, jika terjadi kesenjangan sosial-politik, agama, dan budaya, berarti bahasa merupakan alat kekuasaan dalam mereproduksi kesenjangan sosial itu (Heryanto, 1996: 95).

Seperti juga dinyatakan oleh Low bahwa penggunaan bahasa dalam masyarakat tidak dikreasikan sendiri. Low (2001: 72) menyatakan, *“I express my life in social institutions (language, for example) that I alone do not create, that are an intersubjective milieu, that express themselves in me and help frame and articulate my experience.”* Selanjutnya, *“Whether expressing truth or values, language rest and folds back upon the body’s lived through encounter with the world and others. However, by seeking recognition using language in equitable social setting, I am also operating at the level of social contract.”*

Para filosof generasi pertama berargumentasi bahwa, *“that language could at last provide that foundation through which philosophy could specify an ultimate court of appeal for all truth claims* (Koopman, 2007: 702).

Bernstein (1972:162) menyatakan bahwa bahasa berhubungan dengan dan sosialisasinya. *“I am required to consider the relationships between language and socialization.* Dinyatakan oleh Bernstein bahwa, *“socialization refers to the proces whereby the biological is transformed into a specific cultural being. It follow from this that the process of socialization is a complex process of control,*

whereby a particular , cognitive, and affective awareness is evoked in child and given a specific form and content.”. Trudgill (1983:14) juga mengatakan adanya keterkaitan antara bahasa dengan masyarakat. Dikatakannya, “it is clear that booth these aspects og linguisti behavior arem reflection of the fact that there is a close inter-relationship between language and society. Termasuk dalam dalam masyarakat itu adalah pola-pola perilaku dan budaya yang ada pada masyarakatnya. Masyarakat yang menganut patrilineal, misalnya, pemakaian bahasanya juga menunjukkan adanya perbedaan pola. Dalam masyarakat demikian, pemakaian bahasa perempuan memiliki kecenderungan lebih sopan dibandingkan dengan bahasa laki-laki. Holmes (1993: 320) menyatakan, “Women put more ephasis than men on the polite or effective functions of tags, using them as fasilitative positive politness devices. Men, on the others hand use more tags for the expression of uncertainly.

Adanya keterkaitan antara bahasa dengan masyarakat (khususnya konteks sosial) juga disampaikan oleh Labov (1972: 283). Dikatakannya bahwa, “A siciolinguistic variable is correlated with some non-linguistic variable of the social context: of the speaker, the addressee, the audience, the setting, ets. Konteks itu berhubungan dengan makna dalam bahasa walaupun dalam pemakaiannya bersifat selektif (Bernstein, 1972: 165). Oleh karena itu, menurut Dede (dalam Shin, 2007: 25), bahasa (khususnya bahasa Indonesia) juga berperan sebagai penanda stratifikasi sosial, lambang prestise, dan pembawa citra modern.

Dengan adanya keterkaitan itu, peneliti bahasa, khususnya peneliti pragmatik meneliti unsur-unsur bahasa yang dianggap universal kemudian dibandingkan pengungkapan verbal konsep-konsep tersebut seperti bentuk-bentuk bahasa yang mengungkapkan kesantunan (mohon maaf, penolakan, bentuk-bentuk perintah, dan sebagainya). Hasil penelitian biasanya dikaitkan dengan latar belakang penuturnya untuk melihat kaitan antara bahasa dan budaya

(Darmojuwono, 2007: 98; Lounsbury, 1972: 39; Halliday, et al., 1972: 144; Markhamah, 2000a: 261), bahasa dan kekuasaan dan kepercayaan (*power*) (Brown and Albert Gilman, 1972: 254; Nader, 1972: 280; Markhamah: 2002: 182), bahasa dan status dan kekerabatan (*status and familiarity*) (Geertz, 1972: 282), bahasa dan *setting*, penutur, topik, fungsi interaksi, dan bentuk (Hymes, dalam Ervin-Tripp, 1972: 192).

Secara linguistik kesantunan berbahasa diketahui dari hal-hal berikut: pilihan kata, pemakaian jenis kalimat. *Pertama*, dalam bahasa Indonesia terdapat kata-kata yang menunjukkan adanya kesantunan tinggi, sedang, dan rendah. Untuk menunjukkan kesantunan tinggi penutur sebaiknya memilih kata-kata yang memiliki makna kesantunan tinggi. Demikian juga sebaliknya, untuk menunjukkan kesantunan sedang atau rendah penutur bisa memilih kata-kata yang menunjukkan kesantunan yang sesuai.

Kedua, Jenis kalimat pada umumnya memang menunjukkan referensi atau makna yang sesuai. Namun demikian, tidak selamanya seperti itu. Ada kalanya penutur menggunakan kalimat tanya, tetapi sebenarnya penutur ingin memberitahukan sesuatu kepada mitra tuturnya. Misalnya, seorang penutur yang merupakan mahasiswa ingin memberitahukan secara langsung kepada dosennya tentang ilmu yang belum diketahui oleh dosennya tidak berani atau dipandang tidak etis bagi masyarakat tertentu. Oleh karena itu, mahasiswa tersebut memberitahukannya dengan kalimat tanya. Di samping itu, penutur dapat menggunakan kalimat berita untuk menyatakan perintah. Penggunaan kalimat berita untuk menyatakan perintah dinilai lebih halus karena penutur tidak serta-merta memberi perintah kepada mitra tuturnya.

Ketiga, pemakaian kalimat pasif untuk menghindari perintah secara langsung. Selanjutnya, kesantunan berbahasa dalam penelitian ini juga mengacu pada kesantunan linguistik tuturan imperatif dan kesantunan pragmatik imperatif. Menurut Rahardi (2006: 118)

ada empat faktor penentu kesantunan linguistik tuturan imperatif bahasa Indonesia, yaitu: (1) panjang-pendek tuturan, (2) urutan tutur, (3) intonasi tuturan dan isyarat-isyarat kinesik, dan (4) pemakaian ungkapan penanda kesantunan.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa teks terjemahan Al-Quran mengandung kesantunan sosiolinguistik, yang merupakan bagian dari etika berbahasa yang menekankan norma-norma dan nilai-nilai kesantunan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan sosiolinguistik yang terkandung dalam teks terjemahan Al-Quran ini sebenarnya tidak hanya untuk umat Islam, tetapi bersifat universal yang bisa menjadi ukuran kesantunan bagi berbagai kelompok masyarakat dan budaya. Oleh karena itu, kesantunan sosiolinguistik ini secara lebih khusus dapat menjadi rujukan norma dan nilai bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Kesantunan sosiolinguistik dalam teks terjemahan Al-Quran mencakup sikap, tindakan, maupun tuturan. Kesantunan sosiolinguistik dalam sikap mencakup rendah hati, sabar, lembut, dan hormat pada pasangan bicara. Kesantunan sosiolinguistik dalam tindakan meliputi berbicara dengan suara lemah-lembut, mengucapkan dan menjawab salam, mengucapkan kata-kata yang baik, menjaga kehormatan pasangan bicara, berdoa untuk kebaikan mitra bicara, membungkukkan badan sebagai tanda hormat pada pasangan bicara, memenuhi permintaan/perintah, melakukan penolakan atas perintah secara halus, berbuat baik, berlaku adil, dan menciptakan kedamaian. Adapun kesantunan sosiolinguistik dalam tuturan meliputi tuturan yang rinci dan jelas, pilihan kata yang baik dan halus, dan panggilan kehormatan pasangan bicara, dan ungkapan tak langsung/sindiran (Markhamah dan Sabardila, 2008).

Dari analisis di muka dapat disimpulkan bahwa kesantunan linguistik yang terdapat pada teks terjemahan Al-Quran berupa : konstruksi deklaratif, konstruksi imperatif, dan konstruksi interogatif, konstruksi pengandaian, dan konstruksi langsung. Konstruksi

deklaratif meliputi : (1) konstruksi deklaratif dengan kata penegas sesungguhnya yang bermakna perintah, (2) konstruksi deklaratif yang bermakna ajakan dan larangan, (3) konstruksi deklaratif yang bermakna peringatan, (3) konstruksi deklaratif berisi sindiran, dan (4) penggabungan konstruksi deklaratif dan imperatif yang bermakna perintah.

Konstruksi imperatif terdiri atas: (1) konstruksi imperatif dengan makna perintah dan larangan, (2) konstruksi imperatif dengan makna perintah yang menonjolkan pelaku, (3) konstruksi imperatif dengan makna perintah yang bersifat antonim, (4) konstruksi imperatif bermakna peringatan, (5) konstruksi imperatif dengan makna larangan yang menonjolkan penderita, (6) konstruksi imperatif berisi rincian yang bermakna perintah dan larangan, (7) konstruksi imperatif berpola urutan antiklimaks yang bermakna perintah, (8) konstruksi imperatif bermakna larangan, dan (9) konstruksi imperatif yang bermakna larangan dan perintah.

Konstruksi interogatif yang ditemukan adalah: (1) konstruksi interogatif yang bermakna perintah yang berpemarkah kata tanya, (2) konstruksi interogatif perbandingan yang bermakna perintah dan peringatan, dan (3) konstruksi interogatif dilengkapi deklaratif yang bermakna perintah.

Di samping itu, ditemukan juga: (1) konstruksi pengandaian bermakna perintah dengan penonjolan pelaku, (2) gabungan konstruksi pengandaian-interogatif-deklaratif yang bermakna larangan, (3) konstruksi langsung berisi rincian yang disertai sumber informasi yang bermakna larangan, dan (4) konstruksi langsung menggunakan kata menyakitkan yang bermakna larangan.

Hasil penelitian tahun II dapat dinyatakan simpulannya sebagai berikut. Keselarasan yang ditemukan pada klausa teks terjemahan Al-Quran ada empat macam. Keempat macam keselarasan yang dimaksud dipaparkan berikut ini.

Keselarasan 1: S+P-N/FN+N/FN-Dikenal+Pengenal.

Keselarasan ini ditandai oleh struktur fungsional S+P (subjek + predikat) yang diisi oleh struktur kategorial N/FN+N/FN dan struktur peran dikenal+pengenal. Unsur pengisi S berkategori nomina atau frase nomina dan diisi oleh peran dikenal. Adapun unsur pengisi P diisi oleh kategori nomina atau frase nomina dan diisi oleh peran pengenal. Ciri yang bisa dikenali pada keselarasan 1 ini adalah bahwa N/FN pada P sering ditandai oleh penggunaan kata *adalah, ialah, merupakan, termasuk, tergolong* dan sejenisnya. Sementara N/FN pengisi fungsi S tidak memiliki ciri seperti itu.

Keselarasan 2: S+P-N/FN+A/FA-Pengalam+Keadaan. Keselarasan yang kedua ini adalah keselarasan antara fungsi S+P, kategori N/FN+A/FA, dan peran pengalaman+keadaan. S diisi oleh kategori nomina atau frase nomina dan peran pengalaman. Sementara itu, P diisi oleh kategori ajektiva atau frase ajektival dan peran keadaan. Keselarasan ini adalah keselarasan dasar. Artinya, jika strukturnya berubah, misalnya P di depan S, perubahan itu akan diikuti oleh perubahan letak pengisi kategori dan pengisi peran.

Keselarasan 3: S+P-N/FN+V/FV-Pelaku + Perbuatan. Keselarasan ini adalah keselarasan yang terdapat pada struktur fungsional S+P. Fungsi S diisi oleh kategori nomina atau frase nomina dan peran pelaku. Fungsi P diisi oleh kategori verba atau frase verba dan peran perbuatan. Keselarasan ini terdapat pada klausa inti dan noninti. Struktur fungsionalnya adalah SP dengan struktur kategorial N/FN + V/FV dan struktur perannya pelaku + perbuatan.

Keselarasan 4: S+P+O-N/FN+V/FV+N/FN-Pelaku+Perbuatan+Penderita. Keselarasan keempat ini adalah keselarasan antara fungsi S+P+O dengan kategori N/FN+V/FV+N/FN dan peran Pelaku+Tindakan+Penderita. Artinya, fungsi S diisi oleh kategori nomina atau frase nomina dan peran pelaku, fungsi P diisi verba atau frase verba dan peran tindakan/perbuatan, dan fungsi O diisi oleh kategori nomina atau frase nomina dan peran penderita.

F. Kegiatan yang dilakukan

Kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis keselarasan pola fungsi, kategori dan peran dalam teks terjemahan Al-Quran yang mengandung etika berbahasa yang telah dikaji komponen tuturnya oleh Sabardila, dkk. (2003).

Permasalahan tahun III : (1) bagaimanakah karakteristik morfologis bentuk pasif dalam teks terjemahan al-Quran, (2) bagaimanakah perilaku sintaksisnya, dan (3) bagaimanakah hubungan pelaku-tindakan bentuk pasif pada teks terjemahan Al-Quran.

Kebaruan penelitian ini terletak keselarasan antara pola fungsi, kategori, dan peran pada klausa. Selama ini penelitian terhadap pola fungsi kategori, dan peran masih terpisah atau berdiri sendiri-sendiri. Padahal, berdasarkan pengamatan peneliti pada pemakaian bahasa Indonesia, terdapat beberapa pola yang menunjukkan adanya pasangan yang selaras. Misalnya, klausa yang struktur fungsionalnya Subjek -Predikat (SP) pola kategorialnya frase nominal - frase bilangan, pola makna atau perannya biasanya terjumlah dan jumlah. Klausa yang struktur fungsionalnya Subjek – Predikat, pola kategorialnya frase nominal - frase verba, pola maknanya pelaku – tindakan. Namun, pengamatan itu belum didukung oleh hasil penelitian yang memadai. Apakah klausa pada teks terjemahan Al-Quran terdapat keselarasan sebagaimana pengamatan itu?

Selanjutnya, hasil penelitian ini akan menambah khasanah kajian sintaksis, khususnya terkait dengan keselarasan pola-pola antara fungsi, kategori, dan peran/makna. Hasil ini nantinya dapat menjadi sebagian materi ajar dalam mata kuliah linguistik pada umumnya dan sintaksis pada khususnya. Selanjutnya, penelitian serupa perlu dilakukan untuk ragam bahasa lain, atau bahkan bahasa lain, dan berikutnya jika keselarasan itu ada berbagai bahasa dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan keuniversalan dalam bahasa. Adapun hasil penelitian mengenai struktur morfologi, perilaku sintaktis, dan hubungan pelaku-tindakan akan

melengkapi kajian mengenai bidang sintaksis.

Luaran kegiatan ini adalah deskripsi perilaku morfologi dan sintaktis mengenai klausa pasif yang terdapat pada teks terjemahan Al-Quran yang mengandung etika berbahasa. Selanjutnya, hasil penelitian itu diwujudkan dalam bentuk:

- a. Artikel publikasi ilmiah untuk jurnal internasional
- b. Buku ajar untuk mata kuliah Analisis Kesalahan Berbahasa I dan Linguistik Umum.

G. Metode Pelaksanaan dan Pendekatan Teoritik

1. Metode Pelaksanaan

Objek material penelitian ini adalah terjemahan ayat-ayat Al-Quran yang berisi etika berbahasa yang sudah dikaji komponen tuturnya oleh Sabardila, dkk. (2003) Sementara itu, objek formalnya adalah klausa pada ayat-ayat Al-Quran tersebut . Karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan metode simak. Artinya, pengumpulan data dilakukan dengan menyimak klausa pada terjemahan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana di atas yang berkaitan dengan etika berbahasa. Setelah data-data terjemahan Al-Quran yang mengandung etika diurai atas klausa-klausanya, dilakukan dilakukannya analisis berdasarkan fungsi, kategori dan peran unsure-unsurnya.

Sumber data adalah teks keagamaan yang dibatasi pada teks terjemahan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung etika berbahasa yang telah dianalisis komponen tuturnya oleh Sabardila, dkk. (2003). Dengan demikian, penentuan objek penelitiannya adalah sebagai berikut. Peneliti menyimak (Sudaryanto, 1988) (mencermati) apakah di dalam teks terjemahan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung etika berbahasa itu terdapat klausa. Jika terdapat klausa teks itu dipilih sebagai objek penelitian.

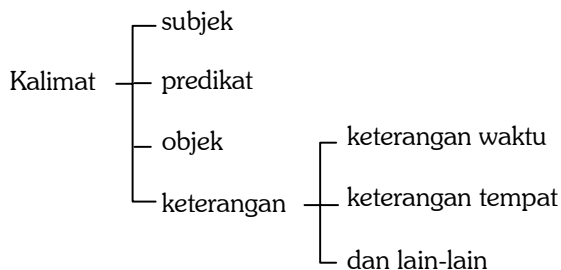
Untuk menguji validitas data peneliti menggunakan triangulasi metode dan sumber data. Triangulasi metode artinya data yang sama diuji dengan menggunakan metode yang berbeda. Adapun triangulasi sumber dilakukan dengan menguji data melalui sumber yang berbeda

Analisis ini menggunakan metode padan subjenis referensial. Metode padan adalah metode analisis bahasa yang alat penentunya adalah hal-hal yang terdapat di luar dan terlepas dari bahasa yang bersangkutan (Sudaryanto, 1993). Adapun metode padan subjenis referensial adalah metode analisis bahasa yang alat penentunya berupa referen yang ditunjuk oleh satuan lingual tertentu. Sementara referen itu bukan merupakan bagian dari bahasa yang bersangkutan. Referen yang dimaksud di antaranya norma atau etika berkomunikasi.

2. Pendekatan Teoretik

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah linguistik, khususnya mengenai fungsi, kategori dan peran. Analisis kalimat berdasarkan fungsi unsur-unsur kalimat adalah kegiatan mengidentifikasi unsur-unsur suatu kalimat dalam menduduki suatu fungsi dari kalimat yang bersangkutan. Fungsi adalah sesuatu yang abstrak, yang perlu dibedakan dengan kategori, dan peran. Fungsi merupakan suatu tempat kosong yang diisi oleh bentuk tertentu yang disebut kategori dan diisi oleh makna tertentu yang disebut peran. Menurut Verhaar (1977) setiap fungsi, dalam kalimat konkret, diisi oleh dua pengisi yaitu pengisi kategorial (menurut bentuknya) dan pengisi semantis (menurut perannya). Verhaar menyebutkan adanya empat terminologi untuk analisis fungsi dan yang dipakai pada penelitian ini adalah pengembangan dari terminologi yang keempat. Terminologi keempat, kalimat dibagi atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berikutnya, keterangan dibagi atas keterangan

tempat, keterangan waktu, dan lain-lain. Terminologi keempat ini jika dinyatakan dalam skema adalah sebagai berikut.



Dari keempat terminologi tersebut, hanya terminologi ketiga yang menyatakan fungsi pelengkap. Terminologi lainnya tidak menyatakan fungsi pelengkap. Terminologi keempat adalah terminologi yang dianut Verhaar, Fokker (1972), Woyowasito (1976), Kusno B.S. (1985) dan Sugono (1991) juga tidak mengutarakan fungsi pelengkap dalam kalimat bahasa Indonesia. Sementara itu, Ramlan (1987), dan Moeliono, et al. (1988), menunjukkan adanya fungsi pelengkap di samping fungsi objek (Markhamah, 2008). Pengembangan yang dimaksud dinyatakan berikut ini. Suatu kalimat dapat dianalisis unsur-unsurnya ke dalam fungsi subjek, predikat, objek, keterangan, ditambah fungsi pelengkap. Fungsi yang ada pada suatu kalimat tergantung kepada wujud kalimat yang dianalisis. Belum tentu semua fungsi ada dalam suatu kalimat.

Analisis kalimat berdasarkan kategori unsur-unsurnya adalah menentukan termasuk kategori apakah suatu unsur dalam suatu kalimat. Analisis kategori adalah analisis terhadap jenis kata atau kelas kata unsur-unsur pengisi fungsi tertentu dalam sebuah kalimat (Verhaar, 1977). Untuk menganalisis kalimat berdasarkan kategori unsur-unsurnya digunakan pengelompokan kata/kelas kata yang dibuat oleh Keraf (1980) dan Kridalaksana (1986).

Analisis kalimat berdasarkan peran unsur-unsurnya adalah kegiatan mengidentifikasi peran unsur-unsur dalam suatu kalimat. Hubungan di antara predikator dengan argumen disebut peran (Kridalaksana, 1993a; 1993b). Terminologi peran yang digunakan menggunakan terminologi Kridalaksana (1993a) yang mengidentifikasi peran ada 16, Verhaar (1977) yang menyatakan peran ada 15, dan Ramlan (1987) yang menunjukkan 22 peran. Ketiganya digunakan untuk saling melengkapi dalam menganalisis perilaku sintaksis klausa pasif pada teks terjemahan Al-Quran.

Untuk mengkaji perilaku morfologisnya / ciri morfologis klausa pasif pada teks terjemahan Al-Quran dipakai teori morfologi, khususnya mengenai bentuk kata dan maknanya.

Untuk menentukan klausa pasif dipakai teori Alivea dkk. (1991) yang menyatakan bahwa faktor yang penting dalam konstruksi pasif adalah: *pertama*, dari segi tema-remas kalimat, yang merupakan topik (titik tolak, apa yang diperbincangkan) dalam kalimat pasif tertentu adalah objek tindakan, bukan pelakunya. Syarat ini menjadi faktor sintaktis yang mutlak harus dipenuhi jika verba transitif merupakan inti dari kata atributif dengan *yang* dan mempunyai relasi objek terhadap anggota nominal yang diterangkan oleh kata ini (misalnya: *anakku yang kurindukan*). *Kedua*, pelaku tidak diketahui, tidak jelas, atau tidak penting untuk disebutkan dalam pembicaraan, sedangkan seluruh perhatian dipusatkan pada tindakan sendiri atau pada tindakan bersama hal ihwalnya. *Ketiga*, pelaku sengaja tidak diingatkan, berdasarkan alasan-alasan tertentu tidak mau dikemukakan. Jika dikemukakan dianggap tidak sopan, tidak mau disebut, atau dianggap berlebihan. *Ketiga*, jika yang dibicarakan adalah tindakan si pembicara atau pendengar, bentuk kalimat pasiflah yang sering dipakai. Pemakaian bentuk kalimat aktif menurut tradisi dianggap kurang hormat atau kurang rendah hati.